

Judul : Optimalisasi UU PSDN, perkuat instrumen pertahanan dengan sumber daya strategis
Tanggal : Minggu, 26 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Optimalisasi UU PSDN

Perkuat Instrumen Pertahanan Dengan Sumber Daya Strategis

ANGGOTA Komisi I DPR Syamsu Rizal memandang, konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) memengaruhi sektor ekonomi, energi, serta kebijakan diplomasi nasional. Konflik itu memberi pelajaran soal penggunaan sumber daya strategis sebagai instrumen pertahanan.

Menurut Syamsu, strategi *weaponizing supply chain* menjadi pelajaran berharga untuk kepentingan pertahanan negara. Saat ini Indonesia sedang menyusun regulasi agar bisa memanfaatkan potensi itu sepenuhnya. Langkah strategis itu diperlukan untuk mengamankan rantai pasok global demi kepentingan nasional.

Upaya itu akan didorong melalui optimalisasi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Contoh kekuatan strategis Indonesia meliputi posisi Selat Malaka bagi perdagangan global serta komoditas minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*). "Kedua aset itu berkontribusi besar memenuhi kebutuhan dunia dan memperkuat posisi tawar," katanya, Jumat (24/4/2026).

Dia lalu menanggapi persepsi publik terkait konsistensi diplomasi Indonesia di tengah dinamika dunia. Langkah diplomasi yang diambil harus mampu menjawab tantangan zaman yang terus

berubah setiap saat bagi negara.

Syamsu menegaskan, perubahan tatanan dunia yang kini bersifat multipolar dan sangat dinamis. Diplomasi Indonesia merupakan respons terhadap volatilitas dunia yang luar biasa besar saat ini. "Pendekatan yang dilakukan harus tidak biasa bahkan melampaui pola pikir konvensional demi menjaga kedaulatan," ujarnya.

Dia menyatakan, konflik Iran dan AS telah memicu krisis energi global yang sangat serius. Gangguan distribusi minyak dunia terjadi akibat ketidakstabilan jalur strategis seperti Selat Hormuz. Padahal, jalur itu mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global sehingga memengaruhi kestabilan harga energi.

Dampak konflik itu, kata dia, mulai terasa di dalam negeri melalui tekanan nilai tukar rupiah serta inflasi. Kebutuhan subsidi energi berpotensi meningkat signifikan sehingga membebani APBN secara langsung. Arus modal keluar dan kenaikan harga minyak global turut mempersempit ruang kebijakan ekonomi nasional bagi Pemerintah.

Kondisi ini menuntut Indonesia mengadopsi pendekatan diplomasi yang lebih adaptif serta antisipatif terhadap situasi. Seluruh komponen negara mulai dari Pemerintah, TNI, hingga DPR perlu berperan aktif merespons dinamika itu. "Kolaborasi antar-



Syamsu Rizal

lembaga menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman krisis global yang semakin nyata," tegasnya.

Di dunia internasional, sambungnya, posisi Indonesia cukup strategis sebagai pemimpin ASEAN dan bagian Global South. Status sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga jadi modal berharga. Kekuatan itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran menjaga stabilitas keamanan serta perdamaian global.

Diplomasi masa depan, kata Syamsu, bukan hanya soal politik dan pertahanan namun harus berdampak pada sektor ekonomi. Target pertumbuhan nasional tidak akan tercapai tanpa stabilitas global serta dukungan penuh semua komponen. "Kerja sama internasional kuat akan mem-

bantu menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan," ucapnya.

Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tengah membangun posisi leverage Indonesia. Upaya itu dilakukan melalui berbagai langkah diplomasi serta keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional. Situasi geopolitik global yang semakin panas menuntut kepemimpinan kuat guna menjaga kepentingan nasional.

Langkah awal strategi itu terlihat saat Menlu Sugiono berkunjung ke Rusia, dan menyatakan Indonesia bergabung dengan BRICS. Presiden dinilai berusaha meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam percaturan politik internasional. Keputusan itu diambil untuk memastikan Indonesia tetap relevan dalam pergaulan dunia serta memperkuat ekonomi.

Bergabungnya Indonesia ke BRICS, kata Utut, merupakan strategi memperluas pasar dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Peluang ekspansi produk nasional ke pasar global jadi semakin besar mengingat jumlah populasi negara anggota. "Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

Utut juga menyoroiti intensitas

kunjungan luar negeri Presiden sebagai strategi diplomasi aktif di tengah dinamika dunia. Kunjungan ke sejumlah negara seperti Rusia dan Prancis dilakukan untuk memperkuat hubungan internasional. Langkah ini diambil guna menjaga kepentingan nasional dari dampak negatif konflik yang terjadi secara global.

Langkah diplomasi itu juga jadi respons terhadap konflik global yang terus berkembang dengan sangat cepat. Indonesia perlu memperkuat posisi tawar tanpa harus terjebak dalam persaingan blok tertentu di dunia internasional. "Presiden juga telah mengunjungi Rusia serta Prancis untuk memastikan posisi Indonesia tetap netral dan aktif," terangnya.

Sugiono mengakui, ada lonjakan dalam aktivitas diplomasi global sejak kepemimpinan Prabowo. Hal itu merupakan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional tetap terlindungi tanpa harus mengorbankan hubungan baik dengan negara lain. Indonesia terus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang abadi serta berkeadilan.

Peningkatan intensitas diplomasi itu mencerminkan sikap proaktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global sesuai amanat negara. "Stabilitas dan ketertiban internasional jadi fokus utama Pemerintah demi mewujudkan perdamaian dunia," tandas Sugiono. ■ PVB